

THESIS

**PERAN PRAKTEK MANDIRI BIDAN DALAM PEMENUHAN HAK IBU BERSALIN PADA PROSES
PERSALINAN (STUDI KASUS DI
WILAYAH KERJA RANTING PANCORAN MAS, DEPOK)**



Dwi Nadia Emilda

NIM: 22.C2.0018

PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN

FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI

UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA

SEMARANG

2024

THESIS

**PERAN PRAKTEK MANDIRI BIDAN DALAM PEMENUHAN HAK IBU BERSALIN PADA PROSES
PERSALINAN (STUDI KASUS DI
WILAYAH KERJA RANTING PANCORAN MAS, DEPOK)**

Diajukan dalam Rangka Memenuhi
Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Magister Hukum Kesehatan



Dwi Nadia Emilda

NIM: 22.C2.0018

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia pada tahun 2022 masih tinggi, salah satunya di Provinsi Jawa Barat sebanyak 571 kasus, persentase kelahiran di pusat pelayanan kesehatan pada tahun 2022 berada pada nilai 94,8%. Dari 91% tersebut dapat disimpulkan sebagian besar ibu hamil sadar akan pentingnya keluarga dalam pelayanan kesehatan, namun mengapa angka AKI masih tinggi, Oleh karena itu bidan sebagai tenaga kesehatan harus dilibatkan dalam memberikan pelayanan dengan mempertimbangkan tingkat kepuasan pasien.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana standar pada pelayanan kebidanan untuk proses persalinan serta bagaimana pelaksanaan peran bidan pada pemenuhan hak ibu bersalin dan apa saja faktor penghambat dalam pemenuhan hak ibu bersalin pada proses persalinan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologi. Pengumpulan data primer melalui studi lapangan dengan cara wawancara. Data sekunder diperoleh melalui dari buku, teks, jurnal, kasus-kasus hukum, maupun pendapat para pakar. Dalam penelitian ini pengelolaan data dilakukan dengan cara yuridis kualitatif. Metode analisis dengan cara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar pelayanan kebidanan untuk persalinan normal mengacu pada Permenkes Nomor 21 Tahun 2021, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023, dan Kepmenkes Nomor HK. 01. 07/MENKES/320/2020. Namun, pelaksanaan peran bidan masih belum optimal, masih ada persalinan terjadi diluar pelayanan kesehatan, kurangnya penjelasan sebelum melakukan tindakan, serta minimnya perhatian dan. Observasi ibu pasca melahirkan hanya dilakukan selama 6 jam pertama, tidak sesuai dengan standar. Faktor penghambat meliputi kurangnya regulasi hukum terkait peran bidan, pengetahuan ibu yang rendah, kurangnya komunikasi bidan, dan kurangnya dukungan dari keluarga selama proses persalinan.

Kata kunci: Peran bidan, Praktek Mandiri, Hak Ibu Bersalin

ABSTRACT

The Maternal Mortality Rate (MMR) in Indonesia in 2022 is still high, one of which is in West Java Province with 571 cases, the percentage of births in health service centers in 2022 is at 94.8%. From the 91%, it can be concluded that most pregnant women are aware of the importance of family in health services, but why is the MMR still high? Therefore, midwives as health workers must be involved in providing services by considering the level of patient satisfaction.

The formulation of the problem in this study is how are the standards for midwifery services for the delivery process and how is the implementation of the role of midwives in fulfilling the rights of mothers giving birth and what are the inhibiting factors in fulfilling the rights of mothers giving birth in the delivery process. This study is a qualitative study using a sociological legal approach. Primary data collection through field studies by means of interviews. Secondary data is obtained through books, texts, journals, legal cases, and expert opinions. In this study, data management is carried out in a qualitative legal manner. The analysis method is by means of qualitative analysis.

The results of the study showed that the standard of midwifery services for normal delivery refers to the Minister of Health Regulation Number 21 of 2021, Law Number 17 of 2023, and Decree of the Minister of Health Number HK. 01. 07 / MENKES / 320/2020. However, the implementation of the role of midwives is still not optimal, there are still deliveries outside health services, lack of explanation before taking action, and minimal attention and. Observation of mothers after giving birth is only carried out for the first 6 hours, not in accordance with standards. Inhibiting factors include the lack of legal regulations regarding the role of midwives, low maternal knowledge, lack of midwife communication, and lack of support from the family during the delivery process.

Keywords: Role of midwives, Independent Practice, Rights of Maternal Maternity